



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA**

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No.98 Telp/Fax. (0536) 3231334, <https://setwan-dprd.palangkaraya.go.id/>, [setdprdkotap.raya@gmail.com](mailto:setdprdkotap.raya@gmail.com), Palangka Raya, 73112

---

**NOTULEN**

Hari/Tanggal	4 July 2025
Waktu Rapat	Pukul 08.30 WIB
Jenis Rapat	Rapat Panitia Khusus
Sifat Rapat	Terbuka
Tempat Rapat	Ruang Rapat Komisi
Perihal Rapat	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025-2029
Pimpinan Rapat	Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P.
Sekretaris Rapat	Yustinus Gunihardi, SE.,MM
Notulis Rapat	Priska Grace Kely
Peserta Rapat	1. Nada, S.H 2. Bennie Brian Tonni Embang 3. Debora Holdae Veronika Lesa 4. drg. Andjar Hari Purnomo 5. Emi Abriyani 6. Fajar Hery Victorius, S.H 7. Fauzi Rahman 8. FRANS SUNYOTO 9. H.M. KHEMAL NASERY 10. kadis baju kuning 11. Mahdi Suryanto 12. Muhammad Saiful Mujab, S.HI., M.H 13. Rusdiansyah 14. Salundik, S.H 15. San Grito, S.STP., M.Si 16. Sudarto, S.E 17. Sugiyanto 18. Syaufwan Hadi, S.Pi 19. Tantawi Jauhari

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P. (09.38) :** Yang mewakili dari BPKAD kota Palangkaraya. Yang terhormat bapak. Madi. Kita kan. Apa? Hukum. Sepatu dan seluruh ajaran pemerintah kota Palangkaraya serta sekretariat DPRD Kota Palangkaraya. Rapat perdana. Pansus RGD

kota Palangkaraya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Baik 1. Harus kita ingin menyampaikan terkait jadwal. Jadwal kita pembahasan itu. Sudah ini ya sudah ditetapkan bahwa hari ini adalah pembahasan pansus. RPJMD dan tidak mau Mendagri nomor 2 tahun 2000. 25 bahwa. RPJMD itu ditetapkan setelah 6 bulan. Karir pelantikan walikota nah kami pada kesempatan ini ingin kejelasan dulu. Jadwal ini dimulai sejak. Nah setelah setelah walikota dilantik itu tanggal berapa? Tanggal 26 2. Hari jadi masalahnya itu habisnya tanggal berapa tanggal 20 Agustus. Jadi kalau bisa penetapannya sebelum tanggal itu ya 20 Agustus berarti kita masih punya jeda waktu. Masih punya jeda waktu untuk pembahasan RPJMD ini kan masih bulan juli masih 1 2 bulan lagi lah hampir satu bulan setengah. Oh, kita melihat beberapa hari ini sudah mempelajari daripada rancangan yang ada ini. Raperda yang sudah ada di hadapan kita ini sudah melalui proses proses tahapan penyusunan apbn. Sesuai dengan Mendagri rapat tentang tahun 2017, dimulai dari persiapan kemudian itu menyiapkan persiapan data kajian akademik, kemudian penyusunan ranwal dan. Lasan rakyat ya kemudian ada banjir musrembang dan pembahasan rancangan akhir dan ini pun sudah dibahas melalui dprd. Artinya ee materi yang ada di hadapan kita ini sudah melalui beberapa tahapan. Nah yang ingin kita bahas pada hari ini adalah penajaman penajaman kemudiannya apa saja yang akan kita berikan? Masukan masukan dan pertanyaan terhadap pemerintah kota. Mungkin itu nanti kita sepakati dulu sebelum kita memberikan masukan masukan dan penajaman penajaman kita. Berikan dulu kesempatan kepada pihak pemerintah kota. Untuk menyampaikan secara umum ya karena ini. A semua draf disiapkan oleh pemerintah kota, jadi kita ingin pandangan umum artinya gambaran umum bisa disampaikan sekarang. Tahapan tahapan yang sudah dilalui dan pada akhirnya nanti kita akan mempertanyakan ada beberapa beberapa hal. Untuk itu kita berikan kesempatan dulu kepada pemerintah kota untuk menyampaikan.

**Rusdiansyah (09.42)** : karena ketua. Pansus pulang karena enggak cara ya kemarin saat rapat banmus. Ini menjadi keinginan pimpinan dprd. Sebenarnya ya langsung lah ya kalau bisa. Artinya pembahasan RD ini. Selesai lebih cepat. Ya. Malah malah kalau keinginan riau tanggal 10 ya kita paripurna ya mungkin itu yang jadi. Acuan kita terlebih dulu bahwa keinginan beliau kemarin, karena saat itu penyusunan jadwal itu terutama saya ingin ada perjalanan mbak. Jadi saat itu untuk rontokan dan ketua permintaan ini benar benar

harus selesai. Saya bilang saya jamin ini selesai. Nah itu mungkin itu saja. Enggak. Terima kasih.

**Syaufwan Hadi, S.Pi** (09.44) : Tapi juga harus tidak mengabaikan, karena ini adalah. Ya rambu rambu bagi pemerintah kota. Dalam menjalankan programnya sampai 2036. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P.** (09.44) : Kita sebagai anggota DPRD tentu semuanya ingin berjalan dengan lancar. Sama seperti kemarin di Kalimantan selatan mereka supportnya luar biasa sehingga perda ini sudah bisa ditetapkan. Kita pun ingin demikian. Namun saya sepakat dengan adinda gado bahwa tidak boleh kita. Melalaikan hal hal yang penting yang perlu kita bahas pada forum ini. Terima kasih pak. Wah sudah mengingatkan kita, jadi kita tidak tidak juga ingin melambat lambatkan kalau memang ini selesai kita ketuk gitu ya? Nah, tidak perlu menunggu sampai tanggal 20 Agustus itu tadi hanya hanya apa kita. Menyampaikan bahwa jeda waktu 6 bulan itu berakhirnya pada tanggal 20 Agustus. Begitu ya jadi mudah mudahan kalau kita bisa selesai 1 2 hari ini. Alhamdulillah kalau memang belum belum bisa selesai, ada hal hal yang masih tertinggal ya ini masih ada hal hal yang belum kita lakukan pada tahapan ini.

**H.M. KHEMAL NASERY** (09.45) : Sebelum pihak tempo menyampaikan memaparkan tentang materi kita pakai hari hari ini kita sepakati dulu supaya cepat sistematis supaya pemirsa kita telah kita sebagai informasi kita apakah mbak perbab tapi sampai berbaw 31 kita ubah kecepatan itu saya cepat supaya apa? Yang ngamar tidak kemarin kemarin kita apa fokus pada materi itu aja pimpinan sama. Makasih.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P.** (09.46) : Abis ini udah ya. Iya nanti nanti kita sepakati untuk pembahasan itu. Nah, apakah kita nanti apa memilih yang urgent saja yang kita anggap yang sudah beres kita lewatkan begitu ya jadi kita berikan kesempatan kepada cnn. Sampaikan.

**drg. Andjar Hari Purnomo** (09.46) : Kita semua. Iya bukan hormati. Nah ketua dan seluruh anggota dewan wakil rakyat daerah kota orang kaya ya dalam pembahasan kerja d 2. 2 5 2009 ya kami menyampaikan yang sudah disampaikan bapak sekalian dari dewan di kota Palangkaraya terkait dengan. Sebagai. Ini pedang. Penting yang mendasar terkait untuk sebab. Apa pembangunan kapal nelayan memang teknis paket tiba sengan. Dan mendalam dengan tidak melupakan.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P. (09.48) :** Oh iya yang terhangat ibu yang sudah datang kepala BPPRD makan atau ada yang disampaikan dulu dari pemerintah. 5 kasih bu ketua pansus. Sistem. Jadi sebagaimana yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa. Nomor 2 2025 itu. Menyampaikan. 2. 40 hari sebelum penetapan itu sudah harus ada persetujuan. Dewan dengan pemerintah kota. Ini kenapa tanggal 10 itu 14? Kita.

**kadis baju kuning (09.48) :** Pendapat. Masukan untuk penyempurnaan daripada yang kita bahas pada hari. Nah tadi saya sepakat saja apa yang disampaikan oleh asisten ya tadi juga sudah karena kalau dulu itu menyebabkan sekarang tinggal saya. Ada masalah ya? Iya sih. Itu. Jadi ibu.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P. (09.49) :** RPJM ini melalui. Kemarin itu ada hasil. Dengan uang yang kemudian ada. Hasil konsultasi ke berbeda provinsi. Jadi pada kesempatan ini kami sebelum masuk pembahasan perbab kami ingin. Minta keterangan gitu ya terkait hasil anwar yang sudah di konsultan. Jika kemudian ada konsultasi hasil konsultasi ke bakteri, bakteri provinsi dan hasil musrembang, mungkin kami ingin menggaris besarnya bisa disampaikan apakah masukan masukan tersebut sudah terakomodir di dalam draf rancangan akhir ini. Biasanya kalau memang sudah masuk kita. Pengen gimana? Poinnya begitu. Nah kemudian ada lagi yang 2 hasil daripada studi banding kita kemarin di situ ada penyelarasan dengan janji janji wali kota terpilih. Nah janji kampanye. Nah itu apakah sudah terakomodir di dalam eh? Perencanaan ini nah bisa disebutkan di mana nanti kita biar bisa kita periksa bersama sama dan ada satu hal lagi untuk penyempurnaan perda janda ini. Kemarin itu harus dilakukan bnn forum grup diskusi dan itu yang mungkin belum kita lakukan. Nanti teknisnya seperti apa bisa kita tanyakan itu bisa bersamaan FGD bisa bersamaan dengan pembahasan ini. Nah itu karena supaya untuk penyempurnaan itu harus dilaksanakan. Sepertinya belum untuk g ya? Kita belum ya? Tapi ya. Itu tidak ada masuk di tahapan. Iya. Sudah ada konsultasi publik memang ya. Provinsi mungkin. Saya kemudian ada teknik. Makasih ibu ketua.

**Salundik, S.H (09.52) :** Setiap dibagi provinsi itu bunganya kita itu supaya melakukan masukkan gitu gitu itu bisa kita dapatkan kita gabungkan dari mereka pun bersiap itu dari provinsi dan dari lain lain. Setelah itu tempatnya. Terima kasih ada tidak wajib guna untuk sempurna untuk kalau bisa. Tidak. Terima kasih.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P. (09.52) :** Yang lain. Udah gede kita itu. Mereka bahkan melaksanakannya itu yang provinsi itu di Jakarta

ini Mendagri.

**Syaufwan Hadi, S.Pi** (09.56) : Polisi daerah itu mungkin masukan dari saya, jadi mungkin bisa berkembang lagi. Terima kasih ya Allah.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P.** (09.57) : Memang yang kita sampaikan itu apakah sudah terakomodir di dalam sini ya? Jadi alangkah baiknya memang kalau kita bahas nanti kalau ada hal hal yang tertinggal bisa kita masukkan sekuat poin.

**Mahdi Suryanto** (09.57) : Oke. Dan juga pimpinan dari pemerintah kota Palangka Raya dan seluruh peserta Indonesia. Hormati ini hanya menyampaikan saya apa yang menjadi agenda kita pada hari ini adalah masuk ke dalam pembahasan. Nah itu saya hanya mendekatkan itu saja di mana dalam. Proses pembentukan peraturan. Daerah. Itu kan sudah melalui tahapan satu perencanaan 2. Penyusunan 3 pembahas. Nanti kita sampaikan itu sebenarnya sudah masuk ke dalam tahap perencanaan dan penyusunan. Maka setelah paripurna kita pada hari ini perbatasan seperti yang pakai mas sampaikan itu benar. Jadi nah ketika kita membahas dalam pembahasan, tentu ada beberapa hal yang tadi disajikan. Nah ini pemerintah kota kan sudah penyidikan. Draft sudah disampaikan di situ semua tersusun sudah redaksi narasi dan seterusnya di situ lah yang kita perlu sempurnakan. Nah, pandangan dari bapak, ibu anggota dewan untuk memberikan masukan atau terkait dengan apa saja itu penajaman dari bahasanya, penajaman atau apa saja yang perlu kita redaksinya. Perlu kita rubah kita sempurnakan kita koreksi dan seterusnya. Karena kalau prosesnya tadi yang tadi disampaikan. Papan jadi itu sudah sudah yang terdahulu kita laksanakan, mau di add atau seterusnya itu ya karena kita pakai sekarang sudah masuk pembahasan, ya udah udah jauh itu, maka kami saya berpendapat bahwa kita fokus untuk seperti pakai mata. Jadi ketika udah ada bahan di tempat ini maka bahan inilah yang kita bahas baik dari pembukaan. Yang batang tubuhnya penutup penjelasan dan lampiran lampirannya. Memang kalau kalau idealnya membahas dalam sebuah regulasi itu lama, tetapi ini kan karena prosesnya tadi sudah dilalui dari. Perencanaan perencanaan tuh ama tuh penyusunan penyusunan lama lalu pembahasan itu penajaman saja. Jadi kita me menyempurnakan apa yang belum terakomodir di situ atau sudah terakomodir. Tapi lebih tau kita sempurnakan kembali karena ini kan prosesnya masih ada lagi ada evaluasi positif. Tapi kemudian dan seterusnya seperti itu. Terima kasih.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P.** (10.00) : Materi rancangan perda yang ada di depan kita. Adapun untuk bnn dan lain lain tadi dulu iya, kemarin

memang pesan ketua kita. Ketua pak subandi memang harus ada gitu, karena itu yang belum kita lalui. Mereka juga pembahasan sembari ada, d. Warung. Discussion. Luar. Di luar itu ya. Kemarin kau tanyakan lagi pak bisa sambil pembahasan itu ada, d. Waktunya memang. Iya baik. Kalau gitu kita lupakan dulu itu kita bahas yang ada ini ya. Nanti kita bicara pengaji terkait ini. Baik silakan kita buka dulu rancangan awal. Rancangan paling depan ya? Wali kota Provinsi Kalimantan peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 2 nomor belum ada ya tahun 2025 di sini sudah ada. Sepintas saya baca ada beberapa undang undang. Yang memang tahunnya agak terbuka gitu ya. Nanti ini mungkin secara teknis bisa diperbaiki. Ini perbaikan diurutkan tahunnya ini poin poin nomor 6 dan 7 ini ini tertukar. Siapa diurutkan tahunnya undang undang nomor 2 3 tahun 2014 yang poin nomor 7 itu undang undang nomor 2 5 tahun 2009. Jadi itu tertukar. Biasanya akan diurutkan dari tahun yang terendah sampai yang terbaru lah itu mungkin satu. Sambil kita lihat. Ki hukum udah ya lengkap ya. Apa ada dasar hukum yang belum dimasukkan. Kini sudah ada permendagri 8 6, 2017 sebagai acuan dan Mendagri tahun nomor 2 tahun 2025. Yang lainnya sudah urut. 2002 satu. Oke ya jangan depan. Nah kemudian dialamat 6 di situ ada. Poin terulang. Poin 12 dan 13 itu sama juga bisa dilihat rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RD adalah dokumen perencanaan untuk berada 20 tahun yang memuat visi misi dan arah pembangunan jangka panjang ketimbang karya. Poin 3 belasnya sama. Berarti kan salah satunya harus dihapus. Iya. RNRNDM yang tinggal DNTRATMERD keduanya. Salah satunya kayak gitu. Tapi waktunya itu sama alloh. 20 tahun lah. Salah ya. Diganti dengan a. Nggak masuk nanti dimasukkan mungkin. Cara 3. Secara ada poin RTJ. KPJ nya yang dimasukkan nanti kepoin 3 belasnya iya. Yang selanjutnya disingkat RJD, lanjut rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat tcc adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Nah, itu mungkin itu koreksinya. Ya berada 5 tahun. D. Ini masih kita sih pasti dicek lagi nggak bagus ya. Oke oke. Nah kemudian urutan urutan urutan urutannya di situ habis RD kemudian RD 14 nya. Itu. WIB rencana tata ruang wilayah itu kan urutannya terputar ya. 4 belasnya mungkin rencana tata ruang wilayah kota Palangka Raya 15 nya rencana strategis dulu gitu ya rencana strategis daerah baru 16 nya rencana kerja pemerintah daerah 7 belasnya baru rencana kerja perangkat daerah. Jadi urusannya itu urusannya mungkin yang diperbaiki. Jadi poin 14. RW dulu yang poin 15 itu kemudian yang poin 6 15 nya. Air rencana renstra. Iya kita dulu. Yang poin 15 poin 6 belasnya RKPD. Point 7, jelasnya. Rencana kerja perangkat daerah

gitu. Susunannya susunannya akan dari yang lebih ini at d renstra ya? Nah itu mungkin diurutkan dari nomor. Pantai yang dianutnya terjadi dorong penjara. Rencana kerja pemerintah daerahnya ke 16. 17 nya rencana. Rencana kerja perangkat daerah. Nah itu urutan urutannya. Cerdas 15 16 17. Iya iya iya bu. Nanti sampai terakhir banyak kerja perangkat daerah. Ya. 14. 15. 15 renstra 15. Kemudian RKPDD 16 17 nya. RKM 17 rencana kerja perangkat daerah. Iya. Oke yang lain ada lagi. Ini kan satu selesai oh satu oke nggak ada masukan lagi gitu. Kita tetap. Bab 2. Untuk bab 2 ini. Udah ya cuma ada 4 pasal 4 bab 4 di situ program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pemerintah daerah itu terulang bahasanya dihapus. Iya. Oke. Oke i 2. Sampai menutup. Yang 2 bab 3. Doa. 4 3. Oke. Banyak mana? Sepertinya oke. 6 langsung 4 ya cara nih gitu. Oke ya. Berarti babnya 5 aja. Oke 4. Bab 5 berarti ya yang 4 7 ini. Oke saya sampai 5. Untuk poin penjelasan saya kira. Lewat? Ada yang perlu di jelaskan? Lanjutnya. Oke ya. Oke. Ya kita masuk bab satu bab satu ini pendahuluan. Pendahuluan adalah latar belakang ada dasar hukum penyusunan RD. Kemudian kita lihat, ya kita lihat satu satu. Ia bisa sambil ini. Banyak ini. Iya. Waduh itu. Iya emang sudah melalui apa ya? Pembahasan yang luar biasa dalam penyusunan iya tadi kan jadi tahu ini kekurangannya kalau yang ini mungkin sama sama kita lihat nanti kalau ada hal hal yang belum yang perlu kita masukkan. Bisa kita tampilkan iya. Sesuai dengan aturan. Ular mati kita membacanya, kita lihat kita lihat sama sama kita lihat sama sama.

**Syaufwan Hadi, S.Pi (10.13) :** Ya kita lihat sama sama tapi tidak perlu ada ya silakan lihat latar belakang.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P. (10.13) :** Kemudian. Kira kira cukup untuk latar belakang di sini memang dalam tahap penyusunan itu ada pendekatan. Ada 4 pendekatan itu pendekatan teknokratik, partisipatif, pendekatan politik dan pendekatan. April. Ia kemudian dasar hukum. Dasar hukum kira kira ini sama dengan yang di depan ya dasar hukumnya. Ya kita lewat untuk dasar hukum. Wongan Antara dokumen dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ki ya. Oke. Kita lewat ini, halaman 8. Kalau menggelapkan bisa dilihat. Kota Palangkaraya harmonis elok bermatabat amanah, transformasi transparan, maju dan berkelanjutan di tempuh melalui 8 misi pembangunan. Jadi itu 8 misi pembangunan poin satu itu ada. Transformasi. Pelayanan. Sosial transformasi ekonomi, transformasi tata kelola. Nah di sini kemudian landasan transformasi. Ada 2 ya keamanan daerah tangguh. Nah ini jadi coba lihat poinnya 12345678. Nah ini untuk uraiannya di belakang. Uraiannya di belakang poin 2. Landasan

transformasi ekonomi berwawasan lingkungan dan berdaya saing global. Membangun pondasi. Nah ini. Poin satu poin 2 poin 3 memperkuat pondasi transportasi transformasinya, pertumbuhan ekonomi, membangun pondasi sentral. Ini ada yang terlewat pengadaan namanya. Informasi pelayanan sosial yang sehat, cerdas. Yang keamanan daerah tangguh. Demokrasi subs. Lansia dan stabilitas ekonomi makro daerah. Itu penjelasannya tidak ada. Waktu, 1 2 3 4. Gini butuh itu. Kita kan keamanan daerah tangguh demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah. Penjelasan di belakangnya.

**H.M. KHEMAL NASERY (10.17)** : Jadi ada masukan tidak ada dewa kita. Nah kalau kalau ada temuan masukan masukan ini akan memakan waktu lama. Iya baik ini yang untuk.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P. (10.18)** : Ya. Alamat, 10 nama saudara. 5 6 7 ya halaman 10 oke ya? Iya aja. Lanjut. Nah lo kalau mau seperti itu oke ya. Terus elements. RCM dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Ini masih ngototnya kerja sama yang baik ya. Ya karena kan pernah ya hubungannya itu silahkan dibaca. Tidak ada tambahan pimpinan unsur pimpinan ya.

**Syaufwan Hadi, S.Pi (10.19)** : Iya kita gini loh. Ini ba sudah ada di sini.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P. (10.19)** : Ini tadi ada ada hubungannya ini knl. 15 halaman 15 WIB. Apa yang mau dimasukkan ini terkait LS di sini ada menjaga daya dukung daya tampung lingkungan. Nah, sudah ada 50 berkas. Sanitasi. Masukkan. Ini belum di sini mungkin. Ini kan secara umum memang belum ada program program apa indikatornya belum ada. Masih secara umum ada masukan pak gadot di sini gimana nanti? Kabarnya dia ini masih umum. Karena. Ya ya. Maksud dan tujuan oke. Oke ini. Oke saya baca oke ya? Nah sistematika penulisan ini ada 5 part i. Iya oke sampai menutup jadi bapak ya cuma tingkat penulisan. Tetap. Jadwal gambaran umum daerah bisa kita lihat. Gambaran umum daerah. Oke ya. Itu disebut kuda. Sama 2. Aman 20. Gambaran umum kondisi daerah. Itu oke, ini sudah melalui gia. Ini satu. Ini kan normatif jadi penting. Ini ada inisial ada yang kurang sedikit ya? Halaman 2 1. Fakta penting di situ ada penjelasan setiap ini kota Palangka Raya terbagi menjadi 5 kecamatan dengan total luas setiap kecamatan ada kecamatan panut. Ada keterangannya di situ sama dan bukit batu ada ini jangan raya tidak ada, jadi bisa dimasukkan itu dokter jalan raya. Nah ini ini. Nah masalah jumlah kita makan ini. Apakah ke depan ini total ke depan? Tidak ada rencana untuk memecah seperti Jakarta atau luas. Harus dipersiapkan juga untuk 5 tahun ke depan. Sandainya tidak sesuai



maka mata, tapi kalau ada ancaman masukkan juga antisipasi. Nah itu sendiri. Ya. Oh coba. Ditanggapin. Langsung, Kabupaten Bangka raya. Kabupaten baru. Ya. Pemerintah udah kok.

**Fauzi Rahman (10.23) :** Undang undang baru terbaru kan ya undang undang baru tentang perbuatan yang masih diragukan. Nah mungkin kalimat yang masuk ke sini tidak mengunci ya tidak mungkin harus, eh tapi pengembangan mungkin pengembangan wilayah yang ada di kecamatan yang barangnya sekiranya. Belum mendapatkan akses pelayanan publik yang baik mungkin seperti itu ditambahkan. Saya masih.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P. (10.24) :** Yang konkrit kita masukkan di sini nanti aja. Ini tidak termasuk. Tunggu dulu ini tadi ditambahkan dengan raya enggak menjelaskan. Nana. Cuma diterapkan. Id penjelasannya fakta penting itu enggak ada jalan raya di situ. Iya iya ditangkap. Sedangkan parahnya bukan hanya 4 kecamatan. Masih maksudnya cukup besar tambahkan karena itu di atas meninggal nya. Nah penjelasan ketinggalan ditambahkan gimana reaksinya? Jangan raya memiliki luas yang cukup besar dan keterangannya ada di atas ya. Ia datang di situ nanti ditambahkan. Oke. Lanjut. Yang terbesar ini. Kasih datang nanti. Ini pp nya. Sambil mereka mencatat ya. Diangkat pak halaman 21.000 enggak bisa diberikan. Pihaknya menambahkan, faktor penting itu ada. Yang terbesar dengan yang terkecil itu aja. Tapi Saudi atas keempatnya masuk pak itu keterangannya 4. Udh masukin batu. Iya diatas memang sudah ada penjelasan. Nggak perlu. Tahun itu. Ana. Diulas lagi yang ada. Karena semuanya masuk, dia aja yang nggak ya? Gua sama lu. Semakin batu aduh. Cuma jalan raya yang luas. 23 simpulan. Indikasi pembangunan. Ya. Gitu. Ukuran RTW. Masuk semua. Karena ditutup oleh lambat lambat kali ini, katanya. Oke impor. Usai itu. ha 24 kontribusi ekonomi. Wah masalah ekonomi tadi. Ada masukan.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P. (10.29) :** Yuk. Oke. Kontribusi lingkungan hidup. Kita di sini ada. Olahan sampah dan limbah. Nah di sini apakah perlu kita tambahkan terkait? Program pemerintah yang gue itu kan pengurangan sampah plastik. Itu sudah masuk di sampaikan kepada. Pengolahan sampah terpadu itu masuk ke situ. Jadi tidak perlu dipertanyakan rasanya. Yang saya sampaikan tadi. Bisa dimasukkan di mana? Karena terkait lingkungan yaitu lingkungan. Ya. Ya maksud saya itu tertera. Narasi itu. Pencemaran sungai rumah dan sungai kahayan.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P. (10.31) :** Ya gimana? Waktunya ditambah di sini. Udh ya. Mereka mana yang baru, tempat yang namanya? Nah,

selain terian sungai dan danau. Bisalah itu ditambah. Kalau saya tadi kan udah masuk pertanyaan yang.

**Syaufwan Hadi, S.Pi (10.32)** : Taman nasional itu beda dengan sumber biasa. Kalau nasional kita kita pun tidak bisa ganggu kan, karena ini taman nasional. Ya maksudnya kan dimasukkan di situ kelestarian sungai dan danau. Itu yang saya yang saya debat jadi dari saudara emal dia memasukkan sungai itu di taman nasional.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P. (10.33)** : Apa itu bunyikan.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P. (10.35)** : Itu di atas persen di atas itu. Ya. Udah bisa. Tarian sungai dan danau ya tambahannya nanti poinnya. Dan kepalanya dulu hanya itu konservasi hutan. Nah. Kepalanya lihat no. Nama itu konfirmasi ulang utang sungai dan danau.

**Salundik, S.H (10.37)** : Saran kami dari dusun jadi ada masukan dari anggota dewan. Tadi kami ribut ribut ini langsung aja pak sudah termasuk di halaman sekian gitu aja. Jadi kita nyanyi gitu ya biar nanti tinggal kita sempurnakan saja. Kasih masukkan itu.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P. (10.38)** : Iya iya. 27. Kontribusi pendidikan. Nah. Pendidikan. Senin. Oke ya oke. Oke ya. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan di sini untuk peningkatan. Ya terkait sekolah khusus untuk anak dan disabilitas. Nah itu itu sampai sampai. Com. Gitu ya. Kita pasti sudah sampai. Dan aku setuju. Tapi untuk BK dan disabilitas kita kota ini kan masih ya. Apa? Masih belum ini ya belum ada ada sih ada satu, tapi ini perlu diperkuat termasuk sumber daya. Nah bagaimana ini kalau kita di mana nanti diselipkan selangkarang para tim penyusun. Nah, kemudian dalam rangka memberantas narkoba untuk pendidikan bagi generasi muda itu di kompleks. Enggak komplet umum itu perlu kita adakan. Mungkin sekolah khusus seperti program Prabowo. Sekarang kan ada sekolah rakyat itu. Nah, bagaimana kita bisa mengadakan sekolah di situ gratis untuk anak anak yang kelas bawah mereka jadi problem. Karena sekolah itu bayar gitu kan? Nah jadi kalau dia gratis itu tidak ada alasan lagi dia tidak putus sekolah karena putus sekolah ini rawan ada masuknya narkoba khususnya di daerah keren dan untun yang sekarang menjadi jalur itu memang pelambaan daerah daerah kumuh ya khususnya gitu. Nah itu kemudian. Ini belum mempunyai panti rehabilitasi untuk anak anak yang terkena narkoba yang milik pemerintah yang ada sekarang ini kan hanya swasta dari Katolik pondok pesantren yang mengadakan kita sendiri yang dari kota belum mempunyai ini mungkin kita belum. Kita perlu perlu ada itulah untuk menanggulangi anak anak yang terdampak. Jadi kita lebih lebih ke

mengobati lah istilahnya karena memang ini tidak bisa dihindari. Peredaran ini pasti secara tersembunyi. Ada dan anak kita terdampak gitu. Jadi untuk untuk rehabnya itu kita. Pemerintah perlu memikirkan ini. Nah itu ada beberapa nanti bisa di iya kan? Iya. Mulai di mana dia di dalam ya? Nah ini di sana nanti disatukan ya kan gitu. Pada lingkungan tadi narkoba harus tentara juga di awalnya penjelasan.

**FRANS SUNYOTO (10.42) :** Terkait usulan baik itu. Pengelolaan sumber daya air lingkungan kemudian pendidikan dan lain lain itu sudah kita masukkan semua karena untuk penyusunan daripada pelanggaran ini memang kita sudah melakukan penyeselarasan baik dengan pgn kemudian dpd kemudian. RPJMN nasional RPJ provinsi. Kemudian kita sudah dilakukan. Dengan fasilitasi maupun konsultasi juga kita berpedoman juga dengan email. Jadi semua urusan pemerintah daerah baik itu urusan wajib pelayanan dasar, kemudian urusan wajib bukan pelayanan dasar. Urusan pilihan urusan pemerintah. Fungsi penunjang itu wajib dimasukkan. Jadi terkait dengan pendidikan inklusif pendidikan. Wah pendidikan dasar itu sudah kita masukkan semua dan kita masukan sesuai dengan kewenangannya. Misalkan untuk pendidikan luar biasa itu dia masuk di kewenangan urusan provinsi di kewenangan provinsi. Jadi kita memang sudah apa? Memasukkan semua. Secara umum karena secara umum kita masukan supaya nanti pada saat penyusunan di renstra maupun rem nya dia itu di renstra di Rinjani itu nanti akan lebih me penanamannya di situ nanti untuk masuk ke dalam programnya sehingga kalau kita di. JMD sudah mengunci apabila ada perubahan kebijakan nanti akan menyurutkan kita sendiri karena bnn masih sifatnya umum sifatnya umum tadi misalkan me akan ada perubahan atau penambahan kecamatan maupun kelurahan nanti. RGD nya masih bisa dilakukan penyesuaian yang penting. Dari kajian hukumnya dari bagian pemerintahan wisata yang mengurus urusan. Wilayah kecamatan kelurahan nanti mengkajinya. Kemudian nanti akan kita akomodir dalam perubahan c nya. Jadi d sebenarnya sifatnya fleksibel sebal. Kemudian. Dia sudah. Apa mengkaji dari semua aspek semua kita semua urusan sehingga nanti. Fokus di RPJMT memang semua urusan berarti dilaksanakan, tetapi fokusnya sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran walikota. Jadi semua urusan nanti fokusnya juga karena kalau semua urusan ditangani, artinya nanti kita tidak fokus karena amanat permanen 8 6 juga. Salah satu untuk kapasitas fiskal kita ada 3 prioritas yang 1 urusan wajib. Kemudian yang 2 itu menyelesaikan visi misi. Walikota wakil walikota yang 3

adalah urusan pemerintah. Fungsi lainnya jadi yang bukan wajib pelayanan dasar tadi demikian yang dapat kami sampaikan.

**H.M. KHEMAL NASERY (10.46) :** Karena sipit peraturan perundangan Indonesia tidak mundur. Contoh satu sekarang sudah di bawa swasta pun harus digratiskan. Pihak pengembang siap berbagi sebagai nah sekarang baru lagi. SMA mau dikembalikan ke kota nah betul makanya dinamai g ini sifatnya umum. Kenapa peraturan turunan kita ini nggak bisa mengampulasi tengah jalan susahnya kewenangan kewenangan dpd itu kewenangan provinsi, makanya dulu itu itu kita menselaraskan gitu. Jangan jangan kita masukkan dalam kejadian ini. Ternyata bukan karena kewenangan kita. Maka supaya kita perlu menyampaikan ke provinsi ini apa ini ranah provinsi itu minta makasih.

**Salundik, S.H (10.47) :** Tapi kalau memang ada masukan dari anggota dewan bisa dimasukkan sebagai tidak melanggar aturan. Terima kasih.

**FRANS SUNYOTO (10.47) :** Norma dan aturan dimasukkan semua karena untuk penyusunan rpp ini secara. Peraturan berorientasi pada proses itu wajib mengakomodir a. Secara partisipatif politis kemudian macam laptop down itu dari masyarakat. Makanya ada musrembang kemudian ada pembahasan dengan dpr secara politis. Kemudian partisipatif kita mengakomodir dari opd sesuai kewenangan kemudian teknokratik. Berdasarkan kajian akademisi demikian artinya sampai dengan ditetapkan ini masih bisa ada memberikan masukan dan saran untuk perbaikan. Terima kasih. Oke artinya apa yang menjadi masukan kita tadi nanti di mana kalian ngomong? Masukkannya gitu kan kalau memang di sini masih umum, tidak usah dimasukkan di sini nanti di mana di indikator mana bisa diselipkan itu. Ya gitu ya. Iya narasi kalau untuk program dia sudah terbukti karena seluruh Indonesia sudah menggunakan ict itu berbeda untuk program program indikator sudah narasi. Kemudian terkait permasalahan isu strategis masih bisa dimasukkan.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P. (10.50) :** WIB. Artinya lanjut ini digital ya oke ya. 4 kita biar jadi mengenaskannya berapa bulan? Sekarang. Oke ya. Potensi sumber daya alam. Halaman 2 9. Ini oke aja kayaknya. Oke nanti. Hanya karena gimana ya? Pic kawasan lindung. Hutan lindung. Suaka alam ini.

**Tantawi Jauhari (10.52) :** Informasi. Nah maksud saya ibu bapak. Ini kan proyeksi. Enggak? Apa ibu. 2002. Maka. Di dalam terdapat. Kita masukkan ini persoalan. Masyarakat itu termasuk di dalam upaya melakukan nggak usah kawasan ya. Wah ee. Itu 1 2. Ada yang sudah

terbit sertifikat dan orang mau balik nama itu tidak bisa dilakukan dengan nyaman karena berada di posisi utang. Nah, saya kira ini ibu bapak perlu diketahui tidak hanya sebagai pengetahuan saja tapi pak wayan. Upaya penyelesaian enggak karena ini berbahaya ke depannya. Itu masyarakat yang saat ini membeli rumah. Itu akan menjadi persoalan di kemudian hari. Itu satu 2 itu bagaimana bang lembaga pembiayaan itu me? Menyiapkan kreditnya hanya. Enggak ada ekornya? Apa yang mereka kemudian bisa menyarankan negeri ya secara gratis 4 di. Pahami karena adanya trik sendiri. Oleh oleh nya sebulan. Itu masih masuk kawasan utama ya itu itu soal yang harus. Diketahui reza buat orang kaya karena yang mumpuni itu adalah orang orang kaya ini yang masih. Oleh terima kasih pak awi.

**Bennie Brian Tonni Embang (10.55)** : Dan salah satu kasus yang sekarang terjadi mungkin di wilayah news. Yos itu banyak. Masyarakat yang tidak bisa. Ya buat bikin sertifikat gitu loh karena situasi dari status kawasan hutannya adalah hutan ya jadi maksud saya dari pemerintah kota tolong didorong di khususnya di Dinas dinas kehutanan supaya pelepasan kawasan hutan gitu. Saya kira karena memang ada yang sudah terbit ada yang dulu. Karena kalau kita menguruskan urusan sertifikat, alasannya tidak bisa karena status kawasannya. HPK begitu jadi harus mengurus pelepasan kawasan dulu. Iya. Nah jadi mungkin dari pemerintah kota bisa mengusulkan untuk me khususnya di apa ya? Nah jadi kalau pekerjaan itu sudah jelas wilayah pemukiman yang bisa disertifikat oleh masyarakat. Kasihan masyarakat yang lain karena kita jual beli jual beli taunya enggak bisa 1 3 nah ini kasusnya kembali ke kebalikannya 2 sertifikat. Iya, saya kira itu. Terima kasih.

**Emi Abriyani (10.56)** : Bapak walikota sudah ada komunikasi dengan menteri kehutanan ini. Mungkin ada beberapa kawasan yang menjadi statusnya, jadi akan dihapuskan yang tau aja dan nanti dengan ketua. T juga akan ke kemen. Dengan perusahaan tapi berbeda dan juga dari BPK ini sedang ditindaklanjuti oleh bapak wali kota Palangka Raya untuk pelepasan kawasan kawasan ini sendiri. Gitu aja jadi kamu.

**Tantawi Jauhari (10.57)** : Rumah atau bisnis properti mau membangun, pasti ada proses perizinannya. Iya bisa terbit izin seperti itu. Saya bisa tunjukkan rumah rumahnya dan orang orangnya.

**Emi Abriyani (10.58)** : Pemilik tapi GB jadi hak guna bangunan jadi apa? Untuk yang ada beberapa rumah memang di kawasan itu g. Anda coba lihat di sertifikat saya yakin 1 6 banget.

**Syaufwan Hadi, S.Pi (10.58)** : Ah. Mungkin yang ibu sampaikan itu bukan dalam kawasan hutan. Yang dimaksudkan kami ini adalah yang ada

di dalam kawasan hutan. Kawasan hutan itu bisa HPHPK bisa cagar alam bisa taman nasional tidak boleh ada izin apapun. Kalau dia di dalam KPK itu jelas itu intinya di situ itu masih itu yang disampaikan tadi itu.

**Tantawi Jauhari (10.59)** : Bisa bikin perumahan itu. Di atas kawasan gitu loh masih.

**Tantawi Jauhari (10.59)** : Ini saat ini ada luasan kawasan ya rinci di sini. Lalu ada upaya pemerintah untuk pelepasan kawasan saya. Saya tanya ini maksudnya gak kawasan kawasan yang saya sebutkan itu satu 2 saya bukan usia yang sesampai itu kok bisa? Terima kasih.

**Mahdi Suryanto (11.00)** : Ini 2 hal yang berbeda yang tadi sampaikan waktu ada dugaan permasalahan hukum kesal kasus ini. Izinan nah yang pada hari ini. Na pembangunan daerah jadwal. Di dalam bencana ini kan ada beberapa yang dimasukan ke dalam Minggu ini, tetapi tadi kalau yang seperti selalu bilang ini sudah terjadi, kan ada di beberapa tempat ya masuk kawasan tetapi ada perizinannya kan begitu kalau kita berbicara kenapa ada keinginan pasti ada. Karena ada proses ketentuan yang mengatur bertanya. Ini kan perlu haji yang memahami bahasa ini perlu penelitian, penyelidikan dan seterusnya. Iya kan harus berbicara data ini. Kasus perkasus nah, karena pada hari ini kita sedang melakukan. Pembahasan RPJM emang ada kayaknya gitu nanti mungkin ranah itu nanti jadi yang lain sendiri gini bicara khusus pak ali. Nah kasus ini bisa saja nanti disampaikan ketika memang fungsi dewan ini adalah pengawasan. Di situ ada hal hal yang mungkin dianggap mp.

**Bennie Brian Tonni Embang (11.02)** : Luasannya berapa? Rencananya berapa yang diupayakan oleh.

**Mahdi Suryanto (11.02)** : Rencana ini kan ada hal hal yang mungkin bisa dieksekusi dilaksanakan. Bisa juga tidak ya? Nah ketika kita mau eksekusi itu ada beberapa ketentuan minta apa langkah langkah kajian Indonesia memang harus. Dilakukan oleh legislatif juga selalu mengawasi menyampaikan kalau apabila ada ditemukan yang kurang pas disampaikan enggak ada masalah.

**Mahdi Suryanto (11.03)** : Tidak dimasukkan begitu? Jadi pertanyaan dari dewan kan enggak kan kalau dimasukkan kenapa? Kalau tidak kenapa kan begitu. Nah itu mungkin dari teknis nanti. Nah di dalam ini mungkin dari dengar pekerjaan yang bisa. 14. Terima kasih.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P. (11.03)** : Ini kita tidak akan lanjut membahas RC ini. Kasus kan sudah jadi catat aja dulu itu nanti kita.

**Syaufwan Hadi, S.Pi (11.04)** : Kalau di tempat, tapi saya mendukung apa yang disampaikan oleh saudara asri. Andi masalah kawasan ini

masalah yang pelik. Artinya hemat saya, pemerintah kota juga harus memikirkan masalah pelepasan ini. Kita tidak bisa membangun kalau kawasan itu masih dalam kawasan hutan. Gitu loh ini disampaikan saudi itu itu gitu iya rencana iya, jadi itu harus ada dalam rencana rencana pembangunan untuk 2025 2029 ini. Kalau iya kalau tidak akan berarti pemerintah tidak ada niat untuk pelepasan kawasan.

**H.M. KHEMAL NASERY (11.04) :** Informasinya saja lagi. Berkat waktu yang menyampaikan dalam waktu dekat ini kan pak wali, ketua DR pihak pihak akan menunjungi ke Kementerian ini ada kaitan Kementerian.

**Syaufwan Hadi, S.Pi (11.05) :** Wawasannya tidak beres loh itu loh. Maksud saya itu jadi di dalam rencana ini. Kita sudah harus menyampaikan. Ini loh kita harus bicara tentang kawasan.

**H.M. KHEMAL NASERY (11.06) :** Tapi kalau upaya dari tempo sudah ada, tapi kalo status yang berjuang untuk melaporkan status ini bukan kita aja kok gubernur juga berupaya kok. Nah ini dari teman dari pak wali bahwa bu menyampaikan dalam waktu dekat ini itu upaya upaya upaya yang nyata kan. Tapi saya sampaikan tadi apakah usulan ini sudah tergambar dalam dvd gitu loh mas? Bukan bukan seperti itu, maka dituakan atau tidak ya? Nah, apakah perlu nah kapan pun waktu dekat ini ini sebenarnya forumnya adalah ini masuk reaksi udah di DP kita mencapai pihak ya kenapa status kawasan selesai kok sudah ada izinnya dikeluarkan itu panggil BN manggir dinas kehutanan Kementerian kita panggil tangan yang satu ini gitu loh. Gitu ya pikiran.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P. (11.06) :** Ya. Ya enggak bisa ini. Apa saja pesan. Oke nggak ya?

**Tantawi Jauhari (11.07) :** Sumbernya. Jadi pemerintah kota Palangka Raya itu membuat rencana pidana JD pasang kawasan tapi ya. Nah sebelum itu dilakukan inventarisasi dulu yang persoalan itu kasir. Kemudian mana mana yang kemudian akan menjadi perluasan itu harus diupayakan dan dimasukkan dalam. Ini. Sebenarnya enggak enggak benar itu. Nah jadi ibu bapak tolong sampaikan kepada pimpinan ibu bapak. Bahwa persoalan kawasan. Di kota Palangkaraya itu harus dibicarakan setidaknya dari mulai sekarang secara serius. Kalau itu juga berlakukan. Ada soal soal teknis di kemudian hari akan berakibat. Dan itu secara usia juga akan menjadi persoalan. Iya kawan tadi saya sih santai saya tolong tau lama urusan dokumen jawabannya. Itu dapat diamond ya. Buat saya. Usaha d itu harus dimasukkan di diakomodir lepasan kawasan.

**FRANS SUNYOTO (11.08) :** Mohon izin ya kalau untuk program itu kan sudah bagus semua. Jadi kalau terkait pelepasan kawasan. Baik itu pelepasan kawasan sengketa dan lain lain itu sudah terakomodir dalam program perangkat daerah. Jadi untuk me terkait tata ruang wilayah pelepasan kawasan itu di PU kemudian untuk terkait sengketa pertanahan itu ada programnya di. Inas perkin perkimtan kami kasih contoh kan di halaman 250 itu sudah ada. Sebenarnya sudah ada maksud di situ semua. Untuk. Ngawi. V. Dulu. Catat ya. Ya itu kan ada sekitar 1000 program lebih, artinya sudah mencakup semua. Kalau yang untuk sengketa diparkirnya untuk pembebasan lahannya di perkim. Kemudian untuk tata ruang alih fungsi lahan itu di Dinas pu kemudian terkait tata ruang itu dia. Seperti yang disampaikan buka hukum itu produk hukum sendiri. Jadi ada produk sendiri beda terkait rencana tata ruang wilayah RTWW kemudian ditindaklanjuti dengan RTR. Nah kalau dia masih bersifat umum, misalkan tadi pembangunan kantor walikota kami masukkan. Dari program dinas PU, tetapi untuk lokusnya nanti kami kembali berkoordinasi dengan dinas PU. Di mana letak antar walikota ini yang cocok? Kemudian kalau cocok misalkan itu memang eh bisa langsung dibangun. Tapi misalkan itu. Mereka mungkin ada prosedur sendiri yang harus dilalui. Apakah itu evaluasi perda TW? Artinya untuk payung hukumnya RGD untuk fokus pembangunannya. Tetapi untuk fokusnya nanti ada peraturan tersendiri yang me secara teknis akan melaksanakan. Hal tersebut. Gitu aja.

**Mahdi Suryanto (11.11) :** Ya. Forum kita ini kan sekali lagi adalah pembaca. Tadi kan terkesan kalau dari anggota dewan mengatakan sebuah keharusan dari po keliru sebenarnya. Cuma kalau kita mengacu pada undang undang dalam pembahasan ini lah kita justru



mencarikan, mencarikan sesuatu. Solusi, solusi, penyempurnaan penajaman. Kalau memang itu tadi masukkan itu untuk memperbaiki, daripada itulah yang kita pakai. Misalnya mengingatkan, oh belum diakomodir di situ. Oke, yang mana yang disempurnakan menurut dari dewan karena pembuat undang undang. Gede juga kan bersama dengan eksekutif persetujuan bersama. Nah baru nanti kasir kan sesuatu yang sudah disepakati. Saya ingin mengingatkan saja gimana mau lari mau lari. Sama sama iya betul sama sama.

**Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P. (11.12)** : Kita tidak usah berbantahan, jadi usulan usulan itu dicatat di masukkan di mana yang kita tau itu masuknya di mana pertanahan silakan dimasukkan nanti di situ gimana pelepasan, apa rencana pelepasan kawasan itu? Iya iya, karena memang hal hal itu kita temukan dari kasus ya. Kasus dilapangan. Nah, kemudian kita carikan solusi kita masukkan dalam perencanaan program tersebut. Gitu itu ya kita akhiri ini. 53. Oke ya sudah oke. Ini kita jumatan nih apa kita tarik dulu. Iya yang mau jelaskan nanti kita lanjut usia berapa kita lanjut. Apa nanti? Warga, lanjut aja. 5 kasih yang satu ya oke. 1:00. Oke. Bapak ibu untuk rapat kita kita skor ya kita skor kan kita lanjut jalan mudah mudahan bisa tepat waktu.

Pimpinan Rapat,

Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P.

Notulis Rapat,

Priska Grace Kely